

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah inklusi menjadi salah satu alternatif layanan pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) selain Sekolah Luar Biasa (SLB) yang selama ini lebih dikenal secara khusus menjadi tempat untuk ABK mendapatkan layanan pendidikan. Menurut Arriani dkk., sekolah inklusi dipersiapkan untuk dapat menerima secara utuh dan memberi layanan pendidikan bagi peserta didik yang heterogen tanpa memandang perbedaan latar belakang fisik, golongan, ekonomi, sosial dan perbedaan lainnya dengan mempertimbangkan kesamaan hak yang melekat pada semua anak sejak lahir yaitu memperoleh pendidikan yang setara agar dapat menjalani kehidupan secara penuh.¹ Dengan memberikan kesempatan yang sama pada semua peserta didik untuk belajar, maka sekolah inklusi dapat berfokus pada kelebihan yang ada dalam diri peserta didik dibanding dengan kekurangan yang dianggap sebagai hambatan dalam belajar.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah inklusi mulai mendapat banyak perhatian sejak adanya Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, di mana didalamnya membahas mengenai pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) agar dapat mengikuti pembelajaran bersama peserta didik pada umumnya secara bersama-sama dalam satu lingkungan. Dalam pasal 4 ayat 1 permendiknas tersebut bahkan disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.² Berdasarkan pasal tersebut maka setelah adanya penunjukkan sekolah inklusi penting agar setiap sekolah tersebut perlu menjalankan konsep inklusi yang sesuai.

¹ Farah Arriani, dkk. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi (Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: 2022) hlm. 4.

² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) No. 70 Tahun 2009, Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa.

Provinsi DKI Jakarta termasuk provinsi yang sudah melaksanakan pendidikan inklusif mulai tahun 2013 dengan menyatakan diri sebagai provinsi yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pada saat itu, pemerintah menunjuk beberapa sekolah reguler baik negeri maupun swasta untuk menjadi sekolah inklusi, seiring berjalannya waktu sekolah inklusi kian diminati untuk menjadi tempat ABK bersekolah hingga dikeluarkan Surat Edaran Nomor 119/SE/2016 Tentang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) yang di dalamnya mengamanatkan bahwa semua satuan pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi dan tidak diperkenankan untuk menolak PDBK sesuai ketentuan yang berlaku.³ Selanjutnya Semua sekolah negeri di DKI Jakarta diwajibkan untuk menerima PDBK. Merujuk pada Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta.⁴ Dengan begitu sekolah inklusi merupakan tempat yang diharapkan oleh PDBK dan juga para orang tua agar bisa mendapatkan pendidikan yang tidak diskriminatif serta menjadi opsi agar ABK dapat bersekolah di tempat yang dekat dengan tempat tinggal untuk memudahkan mobilitas, mengasah kemampuan bersosialisasi, serta menunjang kemandirian.

Dalam Dapodik per Desember 2020 disebutkan, jumlah Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) sebanyak 32.623. Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) sebanyak 109.086 orang. Namun, kembali ditemui jumlah yang tidak ideal di mana ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) hanya 15,77 persen atau hanya berjumlah 5.144 orang, sedangkan setiap sekolah wajib mempunyai minimal 1 GPK. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam penerapan pendidikan inklusif karena kurangnya tenaga pendidik yang memadai terkait latar belakang

³ Raafinda Nur Afifa dan Ari Subowo. Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi). *Undip E-Journal*. 2023. hlm. 1.

⁴ Peraturan Gubernur Pasal 8 Ayat (1) No. 32 Tahun 2021, Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta.

pendidikannya dapat menjadi hambatan dalam pembelajaran PDBK.⁵ Dari data tersebut tentunya harus ada dorongan tambahan dari pemerintah serta SPPI untuk dapat meningkatkan jumlah GPK yang diiringi dengan kualitas implementasi pembelajaran yang baik, karena masih banyak ditemui guru di sekolah reguler yang tidak tahu cara untuk mendidik PDBK.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Hendriani mengenai kompetensi pedagogik guru sekolah inklusi di Indonesia, hasilnya yaitu kompetensi pedagogik yang dimiliki guru di sekolah inklusi khususnya di Indonesia terbilang rendah dengan persentase kompetensi pedagogik guru 27% sangat rendah, 44% rendah, 22% cukup, 7% baik, dan 0% sangat baik. Hasil tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu latar belakang guru yang tidak sesuai, belum memahami karakteristik PDBK, belum memahami cara mengidentifikasi PDBK, belum membedakan metode pembelajaran peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus, sulit mengidentifikasi kebutuhan siswa yang beragam, dan kesulitan mengevaluasi proses belajar siswa.⁶

Dalam sistem pendidikan guru memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan belajar peserta didik, guru memiliki peran dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan pengalaman, pengetahuan terkait ilmu pendidikan, dan pengetahuan terkait karakteristik peserta didik dengan membuat perencanaan, menerapkan dalam pelaksanaan dan mengukur keberhasilannya dengan evaluasi yang tepat. Pengetahuan guru serta upayanya dalam mengimplementasikan pembelajaran inklusif yang sebaik-baiknya akan membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan yang dilalui sehingga mereka akan merasa lebih dihargai dan terpenuhi kebutuhan belajarnya.

Karena dianggap berbeda, PDBK masih mendapat diskriminasi di sekolah inklusi yang berasal dari guru dan peserta didik lain. Dalam Pratiwi

⁵ Diva Salma Hanifah, dkk. Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Menjalani Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Desember 2021, No.3 hlm. 481.

⁶ Ratna Sari Wulandari dan Wiwin Hendriani. Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Kependidikan*. Maret 2021, Volume 7, No.1, hlm. 156.

dan Wahyudi kekerasan pada PDBK banyak ditemukan dalam bentuk kekerasan simbolik seperti pemberian labeling, perlakuan yang berbeda, dan diasingkan seperti tidak diikut sertakan pada tugas kelompok karena dianggap memiliki kemampuan berbeda.⁷ Diskriminasi ini merupakan bentuk perlakuan tidak adil yang memiliki dampak merugikan saat belajar di kelas. PDBK dapat mengalami penurunan kepercayaan diri, keterbatasan dalam akses terhadap peluang, serta kesulitan dalam mencapai potensi penuh mereka.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang memiliki PDBK di Jakarta Timur, ditemukan belum adanya penyesuaian yang jelas pada pembelajaran PDBK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. PDBK yang bersekolah di sekolah tersebut berjumlah 5 orang dengan kondisi autisme dan hambatan intelektual. Pada saat masuk sekolah peserta didik tidak diberikan asesmen, identifikasi, dan penyesuaian pada kurikulum yang diterapkan, sehingga guru tidak mengetahui secara jelas tentang kondisi, potensi, kekuatan, dan tantangan yang dimiliki PDBK.

Selanjutnya saat proses pelaksanaan pembelajaran PDBK tidak mendapatkan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, kurangnya strategi pembelajaran yang digunakan juga membuat PDBK belajar dengan tidak optimal. PDBK di sekolah tersebut mengikuti pembelajaran yang tidak berdasar pada kebutuhan individual, mereka kesulitan mengikuti pembelajaran seperti memahami materi, mengikuti instruksi, dan menyelesaikan tugas seperti peserta didik lainnya. Ditemukan juga guru yang mengajar di kelas terlihat kelelahan dan kebingungan saat menghadapi PDBK yang sedang tantrum sehingga membuat pembelajaran tidak kondusif, PDBK yang memiliki regulasi diri rendah juga cenderung diabaikan sehingga mereka hanya mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran semauanya, hal itu juga berhubungan dengan tidak adanya capaian pembelajaran yang jelas sesuai dengan kemampuannya sehingga

⁷ Carlysta Novitasari Pratiwi dan Ari Wahyudi. Diskriminasi Siswa Disabilitas di Sekolah Inklusi Sidosermo . *Journal Of Sociological Studies*. Juni 2019, Volume 7, No.2, hlm. 2-3.

kemampuan PDBK relatif tidak berkembang. PDBK juga kesulitan bersosialisasi dengan peserta didik lain karena dianggap berbeda, sehingga PDBK mendapatkan *bullying* dan dijauhi oleh peserta didik lain, hal itu juga berhubungan dengan kurangnya pemahaman guru terkait PDBK yang membuat mereka kesulitan memberi pemahaman yang baik terkait PDBK.

Evaluasi yang diberikan kepada ABK seperti pemberian materi soal juga masih sama dengan yang diberikan kepada anak lainnya. Hal itu membuat nilai PDBK lebih rendah dibanding anak lain. Selain itu, mereka juga mengalami penurunan motivasi dan kepercayaan diri akibat merasa gagal secara terus-menerus, bahkan terdapat PDBK yang menolak untuk mengerjakan tugas karena frustrasi saat terus-menerus tidak bisa mengerjakan tugas.

Data-data tersebut diduga terjadi karena implementasi pembelajaran yang belum sesuai dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan PDBK. Implementasi pembelajaran yang efektif dari seorang guru dimulai dari perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Saat ini semua sekolah di DKI Jakarta diwajibkan untuk menerima ABK, implementasi pembelajaran merupakan komponen penting serta paling dekat pengaruhnya pada kualitas belajar yang perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh setiap guru sekolah inklusi. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian berjudul Implementasi Pembelajaran Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusi Jakarta Timur (Penelitian Survei di Sekolah Dasar Inklusi Jakarta Timur). Penelitian survei ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah, guru dan peserta didik di sekolah inklusi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Terdapat sekolah inklusi yang belum memiliki GPK sehingga pembelajaran dilakukan secara penuh oleh guru reguler.

2. Kompetensi pedagogik terkait PDBK yang dimiliki guru pada sekolah inklusi di Indonesia masih rendah sehingga PDBK tidak mendapatkan layanan pembelajaran yang tepat.
3. Belum ada penyesuaian pembelajaran yang diberikan oleh guru pada PDBK mulai dari perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka ruang lingkup permasalahan akan dibatasi pada implementasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan mengkaji aspek perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang pernah mengajar PDBK di sekolah dasar negeri inklusi wilayah Jakarta Timur.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian ini yaitu: “Bagaimana implementasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusi Jakarta Timur?”

E. Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Jakarta Timur.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi serta kajian implementasi pembelajaran mulai dari perencanaan, proses sampai evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Sekolah Inklusi

Hasil penelitian survei ini dapat membantu sekolah mendapatkan data mengenai proses implementasi perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Sehingga, dapat memperbaiki kekurangan dalam implementasi yang sudah dijalankan.

b. Bagi Guru

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan data mengenai proses implementasi perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, sehingga guru diharapkan dapat mengetahui teknik implementasi yang bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik.

c. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peserta didik berkebutuhan khusus bisa mendapatkan implementasi pembelajaran dan hasil yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki saat bersekolah di sekolah inklusi.

